

**KEEFEKTIVAN e-LPPD DALAM PENYEDIAAN
INFORMASI SIPD DI BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN SEKERTARIAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

RISKYTULLAH PUTRA SAMSUDIN

NPP. 29.1697

*Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: 29.1697@prajaipdn.id.ac

ABSTRACT

Problem Statement : Electronic-Regional Government Implementation Report (e-LPPD) is a report submitted by the local government to the central government online as a means of gluing relationships, which is submitted hierarchically based on the organizational structure of government in the form of a document in the Regional Government Information System (SIPD). **Objective:** In terms of understanding the effectiveness of e-LPPD in providing information, researchers are interested in conducting a study entitled "EFFECTIVENESS OF e-LPPD IN PROVIDING SIPD INFORMATION IN THE GOVERNMENT SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF TIDORE CITY, NORTH MALUKU PROVINCE ISSUES". The purpose of this study was to determine the effectiveness of e-LPPD in the regional secretariat of Tidore Islands City, the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles. **Methods:** The method that the researcher uses is descriptive qualitative research with an inductive approach. Informants in the study were determined by purposive sampling and snow sampling. The data obtained by interview, observation and documentation techniques. Technical analysis of data through data reduction, presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the effectiveness of the e-LPPD has been implemented well but for the level of effectiveness. **Conclusion:** The inhibiting factor is that it has not been maximized because for the results of the e-LPPD that have been uploaded by the Governance Section there has been no direct announcement where this announcement is very important for evaluation material for the Governance Section in the preparation of the LPPD using e-LPPD and also the provision of information in SIPD. Efforts are made by forming a team in the preparation of the LPPD and technical guidance for the preparation of the LPPD.

Keywords: *Effectiveness, Government, information*

ABSTRAK

Permasalahan : *Elektonic-Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (e-LPPD)* merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat secara daring sebagai sarana merekatkan hubungan, yang disampaikan secara hierarki berdasarkan struktur organisasi pemerintahan dalam bentuk sebuah dokumen di dalam Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam hal memahami efektivitas e-LPPD dalam penyediaan informasi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul” EFEKTIVITAS e-LPPD DALAM PENYEDIAAN INFORMASI SIPD DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKERTARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA”. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas e-LPPD di bagian Sekeretariat daerah Kota Tidore Kepulauan, faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan. **Metode :** penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ditentukan dengan cara *purpasive sampling* dan *snow sampling*. Data yang di dapatkan dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisi data melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas e-LPPD ini sudah terlaksana dengan baik namun untuk tingkat keefektivisannya. **Kesimpulan :** Faktor yang menghambat yaitu belum maksimal karena untuk hasil dari e-LPPD yang sudah di upload oleh Bagian Tata Pemerintahan belum ada pengumuman secara langsung dimana pengumuman tersebut sangat penting untuk bahan evaluasi bagi Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan e-LPPD dan Juga penyediaan Informasi dalam SIPD. Upaya yang dilakukan dengan membentuk tim dalam penyusunan LPPD dan bimbingan teknis untuk penyusunan LPPD.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintahan, informasi



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan kedaulatan mutlak berada pada pemerintahan pusat. Hal ini menjadikan pemerintahan pusat sebagai sistem tertinggi dalam pemerintahan yang menjadikannya otoritas tertinggi dalam pemerintahan, sementara pemerintahan daerah merupakan subsistem yang menjalankan kekuasaan pada wilayah-wilayah administratif. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat teknologi terdengar sangat tak asing dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi baik informasi maupun komunikasi untuk menopang kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penerapan *e-government* atau Pemerintahan berbasis elektronik sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, cepat, efisien, efektif, dan transparan.

Dalam perwujudan otonomi daerah di pemerintah daerah harus mampu untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), amanah, serta fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien yang memiliki kesesuaian dengan prinsip *Good Governance*. Untuk mewujudkan hal tersebut kepala daerah memerlukan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya dalam hal ini biasa disebut sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan evaluasi oleh pemerintahan pusat dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Elektronik-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (e-LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat secara daring sebagai sarana merekatkan hubungan, yang disampaikan secara hierarki berdasarkan struktur organisasi pemerintahan dalam bentuk sebuah dokumen di dalam Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Elektronik-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (e-LPPD)* ini selain mempermudah dalam penyediaan dokumen dalam bentuk elektronik, juga dapat membantu mempermudah dan mengefisienkan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu kegiatan wajib dalam Pembangunan Daerah, hal itu dikarenakan untuk memenuhi kewajiban konstitusional kepala daerah. Penyusunan LPPD Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan di Sekertariat daerah Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan program nya. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini bagian pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam penyusunan LPPD akan terlaksana dengan sangat baik apabila semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terintegrasi secara keseluruhan yang kemudian akan dimuat dalam SIPD. Dalam penyajian informasi terkait dengan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah. Serta dapat memanfaatkan teknologi sehingga dalam pengumpulan data dan informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperlukan untuk penyusunan LPPD menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan proses yang lama.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan Kinerja Pemerintahan berbasis teknologi telah menghasilkan output kinerja yang cepat, mudah dan terukur. Namun perlu dilakukan integrasi dengan OPD lain, seperti halnya dalam hal penyusunan LPPD. Penyusunan LPPD masih bersifat manual dan lambat, karena belum adanya instrument laporan LPPD yang termuat dalam aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian, maupun

aplikasi asset/BMD. Sarana prasarana juga merupakan sesuatu yang penting dalam penyusunan LPPD dalam hal ini penyediaan tempat penyimpanan untuk berkas atau dokumen pendukung dalam penyusunan LPPD, hal ini juga merupakan hambatan yang serius dalam penyusunan LPPD. Sehingga tim penyusun harus memiliki ruang penyimpanan sendiri agar tidak terjadinya penumpukan berkas atau dokumen pendukung. Adapun kendala-kendala diatas peneliti dapatkan berdasarkan pra penelitian (wawancara) peneliti dengan Kepala Sub Bagian Otonomi dan Kerja sama Daerah Bagian Pemerintahan.

Dengan kendala yang terjadi diatas menggambarkan bahwa dalam penyusunan LPPD menggunakan e-LPPD dalam penyediaan SIPD di Kota Tidore Kepulauan belum terlaksana dengan baik sehingga peneliti mengidentifikasi masalah yaitu: 1) dalam penyusunan LPPD masih bersifat manual lambat; 2) dalam penyampaian data kinerja OPD pelaksana urusan sering mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data sehingga tidak efisien waktu; 3) dalam penyampaian data kualitasnya juga masih rendah; 4) belum adanya pemberian input kepada OPD pelaksana urusan; 5) belum adanya verifikasi mandiri sehingga kurangnya akuntabilitas dalam penyampaian data.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Pradita Hakiki Ariandi 2017 Universitas Jember, menemukan bahwa Sistem Informasi Manajemen Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIM LPPD) sudah diterapkan dengan baik dengan semua komponen SIM LPPD, namun masih banyak terdapat masalah seperti halnya dalam salah satu komponennya yaitu kurang maksimalnya pemakaian aplikasi *SMS Gateway*, juga masih banyak data yang belum terklasifikasi tidak diisi (TDI), kurangnya pengawasan dari *top management* dalam entri data LPPD, dan juga sering terjadinya gangguan Trafic online sehingga terdapat kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD dan SKPD dalam penyediaan informasi. Di dalam Jurnal Nurhasanah, Nurmah Semil, Taufik Akhyar (2020), menemukan bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Ilir, sudah dilaksanakan dengan efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain: sumber daya manusia kurang memadai, dari segi jumlah personil yang masih kurang, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD dengan OPD, waktu penyusunan LPPD singkat serta data yang tidak/belum tersedia pada setiap bagian yang menyebabkan waktu penyusunan menghadapi kendala. Jurnal Elip Halden, Malik Malik, Ade Thiya Delisa menemukan bahwa Implementasi dari Penyusunan LPPD dalam Pembangunan sudah berjalan dengan baik karena dalam penyusunannya sesuai dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terleta pada tempat penelitiannya, Pradita Hakiki Ariandi Tahun 2017 dalam penelitiannya mengambil lokasi di pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, fokus penelitiannya itu tentang SIM LPPD. Elip Halden, Malik Malik, dan Ade Thiya Delisa Tahun 2020 dalam penelitiannya mengambil lokasi pada Pemerintah Kota Metro Provinsi Lampung, fokus penelitiannya yaitu implementasi penyusunan LPPD. Sedangkan Nurhasanah, Nurmah Semil, Taufik Akhyar Tahun 2020 dalam penelitiannya mengambil lokasi di

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, fokus penelitiannya yaitu efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Adapun pada penelitian ini, topik yang menjadi fokus dalam penelitian adalah efektivitas e-LPPD dalam penyediaan SIPD pada bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, dapat membantu penulis dalam menemukan inspirasi dan mempermudah penentuan teori dan konsep yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan.

1.5. Tujuan.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas e-LPPD dalam penyediaan SIPD di Bagian Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan efektivitas e-LPPD dalam penyediaan SIPD Kota Tidore Kepulauan.

II. METODE

Menurut Simangungsong (2017:185) Teknik pengumpulan data dalam penelitian pemerintahan dan penelitian lainnya terdapat 2 (dua) jenis yaitu "*field research approach*" dan "*library research approach*". Jika keduanya diartikan kedalam Bahasa Indonesia menjadi "pendekatan/Teknik penelitian lapangan dan Teknik penelitian kepustakaan".

Di dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis dalam menetapkan informan menggunakan Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, alasan penulis menggunakan Teknik ini dalam penelitian ini karena sampel yang peneliti ambil merupakan orang yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang pengembangan objek yang akan diteliti oleh penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan, dan Kepala Subbagian Otonomi dan Kerjasama. Adapun analisisnya menggunakan cara analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019:208), peneliti melakukan analisis data yaitu dimulai dari kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas e-LPPD dalam Penyediaan Informasi SIPD merupakan sebuah langkah maju untuk pemerintah Kota Tidore Kepulauan namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, maka dari itu untuk mengukur tingkat keefektifitasan tersebut penulis menggunakan teori efektivitas program, menurut Campbell J.P (1970) yang dikutip oleh Mutiarin D (2014: 96,97) yang dalam teori ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program,
4. tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

3.1. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Bagian Tata Pemerintahan mengenai kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja, hal yang pertama diperhatikan merupakan kinerja yang dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan selain itu kinerja pegawai (tim penyusun e-LPPD) , dan kesesuaian kinerja dengan tujuan organisasi dalam hal ini pembentukan e-LPPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian Tata Pemerintahan bapak Zulkifli Ohorela pada tanggal 10 Januari 2022, penulis simpulkan bahwa kinerja yang dihasilkan oleh Bagian tata Pemerintahan sudah sesuai dengan waktu, tahapan , serta regulasi yang ditetapkan. Sehingga kinerja bagian tata pemerintah dapat dikatakan baik.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak fachrir ranchman pada tanggal 10 Januari 2022 mengenai kinerja pegawai, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja pegawai tata pemerintah sudah bagus hal ini dikarenakan bahwa sudah ada pembentukan tim yang di dalamnya terdapat pembagian tugas masing masing sehingga pegawai bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kesesuaian kinerja dengan tujuan organisasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak fachrir rachman pada tanggal 10 Januari 2022, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal kesesuaian kinerja pegawai dengan tujuan organisasi sudah berjalan dengan baik bahkan sangat baik hal ini dikarenakan bagian tata pemerintah menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota lain yang ada di provinsi Maluku Utara.

Proses dan mekanisme kegiatan di lapangan dalam hal ini penyusunan e-LPPD di bagian tata pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam dalam memenuhi tugas dan fungsinya, strategi yang dilakukan untuk memenuhi beban kerja , hasil yang sesuai dengan beban kerja, dan semangat serta antusias pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.2. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga. Dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap program di Bagian Tata Pemerintahan penulis memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan fasilitas pendukung, kualitas program, tingkat kepuasan. Fasilitas pendukung dalam hal ini semua yang dapat membantu dalam proses penyusunan e-LPPD serta Penyediaan informasi SIPD, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak fachrir ranchman pada tanggal 10 Januari 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk fasilitas pendukung bagian pemerintahan sudah sangat bagus karena untuk fasilitas pendukungnya semuanya tersedia.

Kualitas program e-LPPD dalam Penyediaan Informasi SIPD, merupakan salah satu hal yang penting dalam mengukur kepuasan terhadap program dengan mencari tau bagaimanakah kualitas dari laporan tersebut, sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala sub bagian Kerjasama dan otonomi daerah (OTDA) bapak fachrir ranchman pada tanggal 10 Januari 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk kualitas program belum terlalu bagus hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala yang terjadi dalam system hingga masih terdapat permasalahan dalam penggunaan aplikasi e-LPPD.

Tingkat kepuasan dalam penyusunan e-LPPD dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, dalam hal ini wawancara dengan bapak kepala Sub bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah (OTDA), bapak Fachri Ranchman pada tanggal 10 Januari 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk tingkat kepuasan pengguna belum terlalu puas hal ini karena masih belum sepenuhnya sistem sehingga terjadi beberapa masalah.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam aspek penghimpunan dan penyusunan data penulis membahas tentang pengawasan yang dilakukan, bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan serta apakah pengawasan dapat mempengaruhi kinerja penyusunan e-LPPD dalam penyediaan SIPDD, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak Fachri Ranchman pada tanggal 10 Januari 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa tim penyusun melakukan tugasnya dengan benar dengan mengikuti aturan atau SOP sebagaimana mestinya.

Strategi pengawasan juga menjadi salah satu indikator terpengaruhnya tingkat input dan output, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak Fachri Ranchman, terkait strategi pengawasan apa yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses pengawasan sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan e-LPPD selain itu dalam pengawasan juga pemerintah tidak mau mengambil resiko sendiri tetapi tetap melibatkan inspektorat dalam prosesnya.

Pelaporan Pelaksanaan Program merupakan indikator lain untuk menentukan tingkat input dan output dalam penyusunan e-LPPD. Hal yang diperhatikan dalam indikator ini yaitu terkait aturan baik implementasinya, apakah sudah sesuai aturan atau belum serta penegakkan aturan terhadap hasil kerja pegawai.

Implementasi terkait penegakan aturan adalah salah satu hal yang mendukung indikator pelaporan pelaksanaan program, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak Fachri Ranchman pada tanggal 10 Januari 2022. Selain implementasi terkait penegakan aturan, yang mendukung indikator pelaporan pelaksanaan program juga ada terkait apakah pelaksanaan tugas sudah sesuai atau belum serta apakah penegakan aturan dapat meningkatkan hasil kerja pegawai dalam Menyusun e-LPPD, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak Fachri Ranchman, bahwa pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang ada dan penegakkan aturan bisa meningkatkan hasil kerja pegawai dalam penyusunan e-LPPD dan dapat meningkatkan kualitas penyusunan e-LPPD.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yang dialami tim penyusun dalam proses penyusunan dalam mencapai tujuan dari program penyusunan e-LPPD, dari hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah (OTDA) bapak Fachri Ranchman, beliau menjelaskan bahwa :“Hambatannya yaitu belum adanya pelaksanaan bimtek sehingga memiliki kendala. Oleh karena itu perlu dilaksanakannya bimtek oleh lembaga yang berwenang.”

IV. KESIMPULAN

Efektivitas e-LPPD dalam penyediaan informasi SIPD di Bagian Tata Kota Tidore Kepulauan dapat dinilai dari lima dimensi yang telah dipaparkan, dengan hasil penelitian ini, terungkap bahwa untuk efektivitas e-LPPD ini sudah terlaksana dengan baik namun untuk tingkat keefektifannya belum maksimal karena untuk hasil dari e-LPPD yang sudah di upload oleh Bagian Tata Pemerintahan

belum ada pengumuman secara langsung dimana pengumuman tersebut sangat penting untuk bahan evaluasi bagi Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan e-LPPD dan Juga penyediaan Informasi dalam SIPD. Adapun upaya- upaya yang sudah dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan efektivitas e-LPPD dalam Penyediaan informasi SIPD ialah pembentukan tim sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai, serta pelaksanaan bimbingan Teknik (BIMTEK) serta mencari referensi lain terkait dengan pedoman penyusunan e-LPPD, dan melakukan koordinasi dengan admin yang berada di provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Pentingnya efektivitas e-LPPD dalam penyediaan informasi SIPD di bagian tata pemerintahan daerah khususnya tata pemerintahan sekretariat daerah kota tidore kepulauan secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas selain itu di Kota Tidore Kepulauan terdapat asset tetap Bagian Tata Pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai penunjang yang penting dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan serta membantu pemberian pelayanan administrasi terhadap pemerintah, dengan sarana prasarana tersebut SIPD menjadi bagian dari electronic government dimana memiliki fungsi kritis dalam rencana pembangunan daerah guna menghasilkan: 1) keberhasilan program, 2) keberhasilan sasaran, 3) kepuasan terhadap program, 4) tingkat input dan output , dan 5) pencapaian tujuan menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dengan segala keterbatasan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dan penulis juga berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang bermanfaat untuk kedepanya..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Ismail Nurdin, Sri Hartati, 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Media Sahabat Cendekia.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin, 2014. *Manajemen Birokrasi & Kebijakan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

(Pradipta Hakiki, Ariandi, 2017). Sistem Informasi Manajemen Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIMLPPD).

(Elip Halden, Malik Malik, Ade Thiya Delisa, 2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro.

(Nurhasanah, Nurmah Samil, Taufik Akhyar, 2020). Efektivitas Penyusunan LPPD Kabupaten Ogan Ilir.

